
NYULI

Volume 2

Nomor 1, April 2021

Halaman 1 - 69

**Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah
Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Benius

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Palangka Raya
Email: Email: benius_rentak1965@gmail.com*

Dedy Heronaldo Thamus

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya
Email: dedy.dapos@gmail.com*

Abstract

This study aims to analyze the effect of local revenue and grant spending on regional spending in Central Kalimantan Province. The object of research is the Central Kalimantan Provincial Budget (APBD) taken from 2015-2019. By using multiple linear regression research methods, the results show: (a) local revenue has an effect on regional spending, (b) grant expenditure has no effect on regional expenditure, (c) regional revenue and grant expenditure have a simultaneous effect on regional spending.

Keywords: Regional Riil Income, Grant Expenditure, Regional Expenditures

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja hibah terhadap belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah yang diambil dari tahun 2015-2019. Dengan menggunakan metode penelitian regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan: (a) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, (b) belanja hibah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, (c) pendapatan asli daerah dan belanja hibah berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Hibah, Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber keuangan bagi negara yang sangat besar, bahkan penyokong utama dalam menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan. Salah satu peran agar pajak dapat dipungut pemerintah dengan baik dan efisien adalah penetapan ketentuan perundangan yang mengatur tata cara perpajakan. Ketentuan perpajakan ini harus memuat hal-hal yang dapat membuat wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan perpajakannya (Neneng Hartati, 2015: 65).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada penerapan otonomi daerah yang dilakukan, dimana otonomi daerah merupakan suatu amanat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan, sehinggadaerah dapat mengatur kegiatan rumah tangga dalam menyusun struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Halim, 2008:1, bahwa Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Otonomi yang diberikan kepada daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Di mana, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2018: 11).

Untuk dapat terlaksananya otonomi daerah secara baik dan benar, harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dan diantaranya adanya alokasi anggaran dana transfer atau dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dan nantinya dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Daerah. PAD itu sendiri, salah satu sumbernya berasal dari pajak daerah. Teori *development from below* yang dikemukakan oleh Devey (1988), berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka (Prakosa, 2003: 23).

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

Dalam penyusunan struktur APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan prognosisis dan analisis terkait potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara teliti, cermat dan terukur secara rasional untuk menentukan seberapa besar jumlah target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tidak tercapai target atau tidak terealisasi anggaran pada akhir tahun yang tidak sesuai dengan proyeksi yang ditargetkan. Berdasarkan pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Hibah dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Rp)	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2015	1.174.969.266.556,62	604.198.435.716,00	2.943.921.541.005,60
2016	1.158.303.928.014,48	704.035.182.614,40	2.661.094.311.886,73
2017	1.342.330.618.784,76	684.235.048.521,00	3.123.491.428.965,49
2018	1.616.521.660.227,16	679.353.706.741,31	3.848.629.260.509,34
2019	1.776.231.952.739,76	746.052.446.211,96	4.312.954.965.435,97

Sumber: Laporan Audit Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019.

Dari tabel 1 tersebut, terlihat adanya perkembangan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2015-2019 sedangkan untuk perkembangan realisasi belanja hibah terjadi fluktuasi. Realisasi belanja hibah tersebut, merupakan realisasi yang terdapat di belanja tidak langsung atau belanja operasi di anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2015-2019. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Belanja Hibah tersebut merupakan obyek belanja hibah

barang atau jasa yang dikenakan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.

Penelitian yang dilakukan ini, merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017) dengan judul jurnal *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel belanja hibah sebagai *independent variable*. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh komponen-komponen pada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Hibah dan Belanja Daerah sangat penting dilakukan penelitian ilmiah agar dapat diketahui pengaruhnya dengan jelas dan tepat.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah".

2. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi literature baik dari buku, jurnal, penelitian serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Siregar, S. 2017:16). Obyek penelitian adalah realisasi pendapatan asli daerah dan belanja hibah terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2015-2019 serta yang menjadi subyek pada penelitian ini yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara Nonprobabilitas dengan metode *convenience sampling*. Menurut Sugiyono (2018:142), bahwa *nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

c. Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Indriantoro (2004: 147), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sedangkan Sumber data berasal dari laporan realisasi pendapatan asli daerah, belanja hibah dan belanja daerah dari Laporan Audited Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun selama 5 tahun periode Tahun 2015-2019.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik (Siregar, S. 2017:17).

e. Uji Normalitas

Menurut Agung Nugroho (2005: 107) Uji *Kolmogorov Smirnov* bertujuan membantu penelitian dalam menentukan distribusi normal dengan jumlah data penelitian yang sangat sedikit (kurang dari 30). Uji *Kolmogorov Smirnov* ini sangat membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal.

f. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (*independent*) yang digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas (*dependent*) (Siregar, S. 2017:301).

Persamaan model regresi linear berganda :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y' adalah variabel dependen, yaitu belanja daerah

a adalah konstanta

b₁...₂ adalah koefisien regresi

X₁ adalah variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah

X₂ adalah variabel independen, yaitu belanja hibah

e adalah error

g. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi untuk menunjukkan persentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Nilai koefisien determinasi memiliki range antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka berarti semakin besar variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen. Jika angka R diatas 0,5 maka korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat. Sebaliknya, jika R dibawah 0,5 maka korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah lemah (Siregar, S. 2017).

h. Uji Statistik (t-test)

Untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio, digunakan t-test (Sugiyono, 2007:119). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan.

i. Uji Statistik F

Menurut (Ghozali, 2013) menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan $df=k-1$ dan $df=n-k$, dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel (variabel bebas dan variabel terikat).

j. Definisi Operasional

Variabel Bebas:

Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah

variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain (Sudaryono, 2019:162). Variabel bebas yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah dan belanja hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 tahun periode Tahun 2015-2019.

Variabel Terikat:

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Sudaryono, 2019:163). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2015-2019.

3. Kajian Teori

a. Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2014: 1-2) terdapat beberapa definisi pajak antara lain: pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, yaitu: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Bab IV Pasal 5 Ayat 2, menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana penyesuaian;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. Belanja Daerah

Berdasarkan klasifikasinya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai pasal 55 bahwa Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dirinci atas jenis : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer dirinci atas jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

d. Belanja Hibah

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa "Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

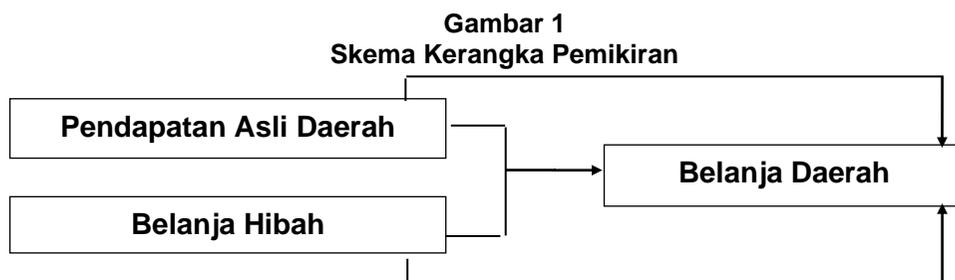
Bentuk Hibah Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuknya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PPKD merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
2. Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

e. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah maka kerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut :



Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk

pernyataan yang dapat diuji (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, hipotesis yang diungkapkan adalah sebagai berikut :

Ha₁ : pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah

Ha₂ : belanja hibah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah

Ha₃ : pendapatan asli daerah dan belanja hibah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Hibah dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019*

Seperti diinformasikan terdahulu, realisasi pendapatan asli daerah, belanja hibah dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari periode Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 realisasi penerimaan kelompok pendapatan asli daerah dari Tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan, kecuali pada Tahun 2016 yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun.

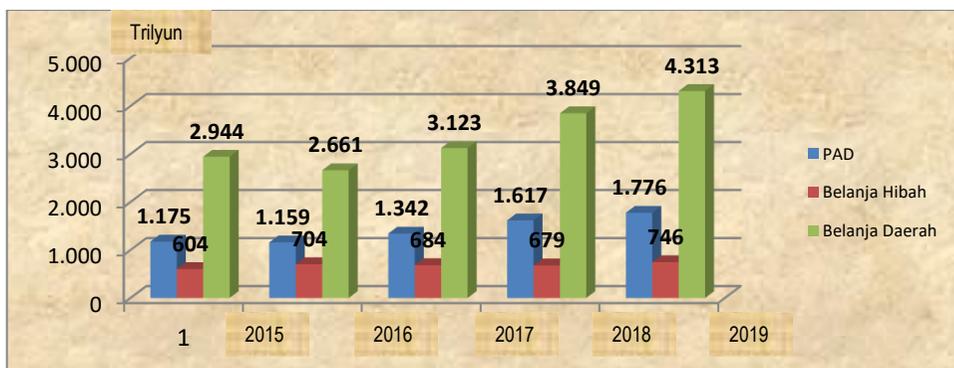
Realisasi Belanja Hibah dari Tahun 2015-2019 juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada Tahun 2018 terjadi penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun.

Realisasi Belanja Daerah dari Tahun 2015-2019 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan trend yang positif bertambah dari tahun ke tahun.

Grafik realisasi penerimaan kelompok pendapatan asli daerah, belanja hibah dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
 Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah*

Gambar 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Hibah dan Belanja Daerah
Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Periode Tahun 2015-2019



Sumber : Laporan Audited Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019

Adapun perkembangan persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019

PAD Tahun ke-n (Rp)	PAD Tahun ke-1 (Rp)	Persentase Perubahan (%)
1.174.969.266.556,62	1.253.708.122.296,09	-6
1.158.303.928.014,48	1.174.969.266.556,62	-1
1.342.330.618.784,76	1.158.303.928.014,48	16
1.616.521.660.227,16	1.342.330.618.784,76	20
1.776.231.952.739,76	1.616.521.660.227,16	10

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 perkembangan persentase realisasi jenis penerimaan pendapatan asli daerah pada Tahun 2015 menurun signifikan sebesar -6%, Tahun 2016 menurun sebesar -1%, Tahun 2017 meningkat signifikan sebesar 16%, Tahun 2018 meningkat signifikan sebesar 20% dan Tahun 2019 meningkat sebesar 6%. Dari data tersebut menggambarkan

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015-2016 terjadi penurunan negatif selanjutnya dari Tahun 2017-2019 terjadi peningkatan yang signifikan atau positif.

Adapun perkembangan persentase realisasi belanja hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Perkembangan Realisasi Belanja Hibah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019

Belanja Hibah Tahun ke-n (Rp)	Belanja Hibah Tahun ke-1 (Rp)	Persentase Perubahan (%)
604.198.435.716,00	584.360.223.868,49	3
704.035.182.614,40	604.198.435.716,00	17
684.235.048.521,00	704.035.182.614,40	-3
679.353.706.741,31	684.235.048.521,00	-1
746.052.446.211,96	679.353.706.741,31	10

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 perkembangan persentase realisasi jenis belanja hibah Tahun 2015 meningkat sebesar 3%, Tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 17%, Tahun 2017 menurun sebesar -3%, Tahun 2018 menurun sebesar -1% dan Tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 10%. Dari data tersebut menggambarkan perkembangan Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017-2018 terjadi penurunan yang negatif sedangkan Tahun 2015, 2016 dan 2019 terjadi peningkatan positif.

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
 Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 4
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2015-2019

Belanja Daerah Tahun ke-n	Belanja Daerah Tahun ke-1	Persentase Perubahan
2.943.921.541.005,60	3.235.800.198.763,29	-9
2.661.094.311.886,73	2.943.921.541.005,60	-10
3.123.491.428.965,49	2.661.094.311.886,73	17
3.848.629.260.509,34	3.123.491.428.965,49	23
4.312.954.965.435,97	3.848.629.260.509,34	12

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 perkembangan persentase realisasi jenis belanja daerah Tahun 2015 menurun sebesar -9%, Tahun 2016 menurun sebesar -10%, Tahun 2017 meningkatkan signifikan sebesar 17%, Tahun 2018 meningkat signifikan sebesar 23% dan Tahun 2019 meningkat sebesar 12%.

2. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov Smirnov menurut Agung Nugroho (2005:107) bertujuan membantu penelitian dalam menentukan distribusi normal dengan jumlah data penelitian yang sangat sedikit (kurang dari 30).

Tabel 5
Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		PAD	Belanja Hibah	Belanja Daerah
N		5	5	5
Normal Parameters ^a ^b	Mean	1413671485264,56	683574963960,93	3378018301560,63
	Std. Deviation	273806110140,117	51577476421,725	682419440943,096
Most Extreme Differences	Absolute	,208	,267	,245
	Positive	,208	,146	,245
	Negative	-,175	-,267	-,155
Test Statistic		,208	,267	,245
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				
d. This is a lower bound of the true significance.				

Berdasarkan uji normalitas di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikan Kolmogorov Smirnov untuk pendapatan asli daerah sebesar 0,200 yang lebih besar dari α (yaitu 0.05) dan nilai belanja hibah sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 sedangkan nilai belanja daerah sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah dan belanja hibah dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu belanja daerah. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995 ^a	,989	,978	100116352899,126

a. Predictors: (Constant), Belanja Hibah, PAD

Berdasarkan uji koefisien determinasi bahwa angka *Adjusted R Quare* sebesar 0,978 yang menunjukkan bahwa variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan belanja hibah sebesar 97,8% sedangkan sisanya 2,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Angka R sebesar 0,995 menunjukkan variabel-variabel penelitian mempunyai korelasi yang sangat erat.

4. Uji Statistik t (t-test)

Uji t (t-test) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing variabel tabel independen, yaitu pendapatan asli daerah dan belanja hibah terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan statistik pada uji t ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Uji t (t-test)

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	806195607916,272	695301183965,646		1,159	,366
	PAD	2,675	,235	1,073	11,385	,008
	Belanja Hibah	-1,769	1,247	-,134	-1,418	,292

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil perhitungan uji t di atas, menunjukkan bahwa kedua variabel independen (pendapatan asli daerah dan belanja hibah) mempengaruhi signifikan variabel dependen (belanja daerah). Pada variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti H_{a1} diterima. Variabel belanja hibah mempunyai nilai signifikan 0,292 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti H_{a2} ditolak.

Untuk regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen, model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y' = 806195607916,272 + 2,675 X_1 - 1,769 X_2 + e$$

5. Uji Statistik F

Pelaksanaan uji F bertujuan untuk menguji variabel-variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah dan belanja hibah, apakah secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian simultan ini membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05 (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007: 16)

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
 Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184273860527270650000000 0,000	2	92136930263635320000000 0,000	91,92 3	,011 ^b
	Residual	20046568235644710000000, 000	2	10023284117822354000000 ,000		
	Total	186278517350835120000000 0,000	4			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), Belanja Hibah, PAD						

Hasil perhitungan statistik uji F memiliki nilai signifikansi sebesar 0,11 di atas 0,05 yang berarti seluruh variabel independen : pendapatan asli daerah dan belanja hibah secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu belanja daerah, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel dependen (belanja daerah). Hal ini dapat dikatakan bahwa H_0 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh dan penggunaan belanja hibah maka akan semakin tinggi pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung dan menunjang peningkatan pembangunan daerah agar menjadi makmur, sejahtera, maju dan mandiri dengan tetap memprioritaskan lebih dahulu penganggaran belanja wajib yang lebih diutamakan atau menjadi skala prioritas.

Adapun dalam Pasal 62 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 62 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Penutup

a. Kesimpulan

1. Hasil uji t, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Belanja Daerah, yang berarti menerima H_{a1} .
2. Hasil uji t, menunjukkan bahwa Belanja Hibah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, yang berarti menolak H_{a2} .
3. Berdasarkan hasil uji- F, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah berpengaruh signifikan atau positif terhadap Belanja Daerah, yang berarti menerima H_{a3} .

b. Saran

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus tetap ditingkatkan lagi.
2. Perlunya strategi dan kebijakan dalam mewujudkan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui :
 - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana layanan kepada publik.
 - b. Pemberian kemudahan akses layanan membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara efektif, efisien dan cepat.
 - c. Pelaksanaan upaya layanan jemput bola ke daerah-daerah melalui kegiatan Samsat Keliling dan Samsat Online Nasional.
 - d. Melakukan pendataan subyek dan objek pajak baru pada daerah yang potensial.
 - e. Pelaksanaan penindakan razia tunggakan pajak secara rutin bersama instansi terkait.

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

- f. Melakukan kegiatan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakat.
 - g. Penyusunan regulasi kebijakan fiskal daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah termasuk upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - h. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan inovasi dan teknologi informasi Samsat Online dan Samsat Nasional.
 - i. Upaya peningkatan pengelolaan aset daerah untuk peningkatan penerimaan retribusi daerah.
 - j. Melakukan identifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah, pengawasan dan pengamanan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah secara terpadu dan terintegrasi sehingga mengurangi kebocoran potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - k. Meningkatkan tambahan dana penyertaan modal pada badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Perlunya kebijakan dalam penetapan skala prioritas porsi penganggaran Belanja Hibah pada Kelompok anggaran Belanja Langsung atau Belanja Modal yang lebih besar dibandingkan porsi penganggaran Belanja Hibah pada Kelompok Belanja Operasi atau Belanja Tidak Langsung sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, menunjang kegiatan produktif masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.
 4. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kemudahan dan mendorong investasi perusahaan-perusahaan besar di daerah yang berorientasi pada produksi barang-barang jadi ekspor, dalam upaya untuk peningkatan realisasi pendapatan daerah, peningkatan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan pembangunan daerah.
 5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian dengan menambah daerah sampel dan rentang waktu penelitian sehingga hasil dapat digeneralisir.

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

DAFTAR PUSTAKA

- Abba, Mohammed, Ahmed Bawa Bello dan Salihu Aliyu Modibbo. "Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship : An Analysis Of Local Government In Adamawa State, Nigeria", dalam *Journal Of Arts, Science & Commere. Vol. 3 No.1. 2015*.
- Abdullah, S., dan A. Halim. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003.
- Adriani dan Yasa. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", dalam *E-Jurnal EP Unud. Vol. 4 No. 11, 2015*.
- Agung Nugroho, Bhuono. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Aprizay, Yudi Satrya dan Muhammad Arfan Darwanis. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dalam *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.3, No.1, 2014*.
- Basri, Syafril. "Pengaruh Output Daerah Penerimaan Transfer dan Desentralisasi Fiskal terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Pekanbaru", dalam *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol. 3, No. 8, 2013*.
- Capkova, S., Ing, D., & Roncakova, L. "Fiscal Equalization and Regional Growth", I (February), 2014.
- Christopher, Russell Olukayade et al. "Determinants of Equity Price in the Stock Markets", dalam *International Research Journal of Finance and Economics Issue 30, 2009*.
- Darwanto dan Yulia Yustika. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar 26-

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

28 Juli 2007, <https://info.perbanasinstitute.ac.id/pdf/ASPP04.pdf>. Diakses
6 Maret 2009.

Dewi, Siska Puspita & Suyanto. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah", dalam *Potensio Vol. 20 No. 2, 2014*.

Ferreiro, J., Garcia Del Valle, T.M., Gomez, C. "Is the composition of public expenditures converging in EMU countries", dalam *Journal of Post Keynesian Economics, 2009*.

Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) Dan Daerah (APBD)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.

Gideon, Zhou & Chilunjika Alouis. "The Challenges Of Self-Financing Zimbabwe", dalam *International Journal Of Humanities and Social Science. Vol.3 No.11, 2013*.

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Bambang Soepomo. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jaya, Jeckly Dharma dan Eka Ardhani Sisdyani. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia", dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9, No. 2, 2014*.

Kainde, Christian. "Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung", dalam *Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3, 2013*.

Liesionis, V. 2013. *Journal of Security and Sustainability Issues* www.lka.lt/index.php/lt/217049/ The Relationship Between Government Expenditure.

*Benius dan Dedy Heronaldo Thamus -
Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Hibah Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah*

Mangowal, Jessy Christine. "Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara", dalam *Jurnal MBA. Vol. 1, No. 4, 2013.*

Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", dalam *Jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka/article/view/445/323. Vol. 1, (1), 2017.*

Nasser, ETTY M. Dan F Agathasari Ayuningtyas. 2007. "Expectation Gap Mahasiswa, Auditor dan Manajer terhadap Sikap dan Kinerja Auditor", dalam *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 7 No. 3, 2007.*

Neneng Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Olubukunola, Olusola. "Boosting Internally Generated Revenue Of Local Governments In Ogun State, Nigeria", dalam *Jurnal Vol. 8 No.1, 2011*

Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Rahmawati, Luluk Atika & Bambang Suryono. "Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah", dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 4, No. 9, 2015.*

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Delapan.

Sa'diyah, Halimatus & Yetty Tri Putri. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara", dalam *Jurnal Akuntansi. Vol. 4, No. 1, 2015.*

Samad, R. Putra & Rita Yani Iyan. "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir", dalam *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol. 3, No. 8, 2013.*

Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bandung", dalam *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No. 8, 2014.*

- Siregar, S. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cetakan-4)*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian (Edisi Kedua)*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V.W.,. 2018. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Edisi Ketiga)*. Bandung: Alfabeta.
- V.Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami. 2019. *The Master Book Of SPSS*. Yogyakarta: Startup.

Sumber Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.